

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak antara prinsipal dengan agen. Hubungan keagenan dapat menimbulkan masalah pada saat pihak - pihak yang bersangkutan mempunyai tujuan yang berbeda, pemilik modal menghendaki bertambahnya kekayaan dan kemakmuran para pemilik modal, sedangkan manajer juga menginginkan bertambahnya kesejahteraan bagi para manajer. Dengan demikian muncullah konflik kepentingan antara pemilik (investor) dengan manajer (agen). Kontrak yang dibuat antara pemilik dengan manajer diharapkan dapat meminimumkan konflik antar kedua kepentingan tersebut (Setyapurnama dan Norpratiwi 2004)

Dalam pengambilan keputusan pendanaan bagi perusahaan manajer harus berhati-hati karena keputusan ini dapat berpengaruh terhadap nilai perusahaan. Meningkatkan pendanaan dengan utang, peningkatan utang akan menurunkan besarnya konflik antara pemegang saham dan manajemen (*Agency Problem*). Keputusan pendanaan ini berkaitan dengan kebijakan manajer dalam menentukan proporsi yang tepat antara jumlah utang dan jumlah modal sendiri di dalam perusahaan sehingga dapat memaksimalkan nilai perusahaan (Rustendi, 2008).

Teori keagenan menyatakan bahwa praktik manajemen laba dipengaruhi oleh adanya konflik kepentingan antara agen dan principal yang timbul ketika

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

setiap pihak berusaha untuk mencapai atau mempertahankan tingkat kemakmuran yang dikehendaknya (Djamaluddin, 2008:56 dalam Nurhayati 2017). Adanya kepemilikan manajerial menjadi hal yang menarik jika dikaitkan dengan *agency theory* (Christiawan, 2007). Konflik keagenan bisa dikurangi bila manajer mempunyai kepemilikan saham dalam perusahaan. Manajer yang sekaligus pemegang saham akan berusaha meningkatkan nilai perusahaan, karena dengan meningkatnya nilai perusahaan maka nilai kekayaannya sebagai pemegang saham akan meningkat pula (Sulistiono, 2010).

Adanya perbedaan kepentingan dan informasi antara principal dan agen memacu agen untuk memikirkan bagaimana angka akuntansi yang dihasilkan dapat lebih memaksimalkan kepentingannya. Cara yang dapat dilakukan agen untuk mempengaruhi angka-angka akuntansi dapat berupa rekayasa laba atau manajemen laba dalam laporan keuangan.

2.2 Ruang Lingkup Perpajakan

2.2.1 Pengertian Pajak

Pajak mempunyai peranan penting dalam pembangunan suatu negara terutama untuk mengisi kas negara. Pengertian pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi “ Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan negara bagi sebesar besarnya kemakmuran rakyat. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa:

1. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
2. Pajak merupakan peralihan kekayaan orang/badan ke kas negara
3. Tidak ada imbalan langsung yang dapat ditunjukkan dalam pembayaran pajak secara individual
4. Dapat dipaksakan
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah yang apabila dalam pemasukannya masih terdapat surplus, dipergunakan untuk membiayai *public investment*.

2.2.2 Fungsi Pajak

Pajak bukan hanya dipungut untuk disetorkan ke kas negara tanpa ada realisasi. Akan tetapi pajak itu sendiri memiliki fungsi di antaranya adalah sebagai berikut (Sudirman dan Amiruddin, 2012 : 3):

1. Fungsi Pendapatan negara melalui pajak cukup besar jumlahnya. Menurut fungsi ini, pajak digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan.
2. Fungsi Stabilitas. Melalui penerimaan pajak, pemerintah dapat mengatur kegiatan perekonomian, sehingga tercipta kondisi yang lebih stabil di bidang ekonomi.
3. Fungsi Pemerataan Peranan pemerintah di antaranya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Untuk mewujudkannya pemerintah membutuhkan dana dalam membiayai pembangunan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembangunan sarana dan prasarana dilakukan dengan tujuan agar dapat mendorong meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja, sehingga pemerataan pembangunan dapat tercapai”

2.3 Manajemen Laba

2.3.1 Pengertian Manajemen Laba

Laba yang dihasilkan perusahaan merupakan salah satu ukuran kinerja yang sering digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Informasi tentang laba sebagaimana dinyatakan dalam *Statement Of Financial Accounting Concept* (SFAC) nomor 2 merupakan unsur utama dalam laporan keuangan dan berperan penting bagi pihak-pihak yang menggunakannya karena memiliki nilai prediktif. Hal inilah yang membuat pihak manajemen berusaha untuk melakukan tindakan manajemen laba agar kinerja perusahaan tampak baik oleh pihak eksternal.

Menurut Sitorus (2006:122) dalam Rindang (2017) manajemen laba merupakan tindakan manajemen untuk memilih kebijakan akuntansi dari suatu standar tertentu untuk mempengaruhi laba yang akan terjadi menjadi seperti yang mereka inginkan melalui pengelolaan factor internal yang dimiliki atau digunakan perusahaan. Menurut Scoot (2009) dalam Solehudi (2017) manajemen laba merupakan keputusan manajer untuk memilih kebijakan akuntansi tertentu yang dianggap bisa mencapai tujuan yang diinginkan, baik itu untuk meningkatkan laba atau mengurangi kerugian yang dilaporkan.

Praktik manajemen laba dalam perusahaan merupakan hal yang logis karena fleksibilitas akuntansi memungkinkan manajer dalam mempengaruhi pelaporan. Dalam melakukan penelitian untuk mengungkap adanya praktik

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

manajemen laba, ada beberapa proksi yang digunakan untuk mengevaluasi manajemen laba. Model yang digunakan peneliti sebagai proksi manajemen laba adalah pendekatan distribusi laba (Philips *et al.*, 2003).

Informasi laba menjadi bagian dari laporan keuangan yang dianggap paling penting, karena informasi tersebut secara umum dipandang sebagai representasi kinerja manajemen pada periode tertentu. Menurut Ahmad dan Belkaoui (2000:78), informasi laba penting bagi pihak-pihak yang berkepentingan dengan alasan yaitu:

1. Laba menjadi dasar bagi perusahaan dalam menentukan kebijakan deviden
2. Laba merupakan dasar dalam memperhitungkan kewajiban perpajakan perusahaan.
3. Laba dipandang sebagai petunjuk dalam menentukan arah investasi dan pembuat keputusan ekonomi.
4. Laba diyakini sebagai sarana prediksi yang membantu dalam memprediksi laba dan kejadian ekonomi di masa yang akan datang.
5. Laba dijadikan pedoman dalam mengukur kinerja manajemen.

2.3.2 Pola dan Teknik Manajemen Laba

Menurut Subramanyam, KR & Wild, Jhon J yang dibahasakan oleh Dewi Yanti (2010:131) dalam Nurhayati (2017) terdapat tiga teknik manajemen laba adalah sebagai berikut :

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Meningkatkan laba

Salah satu teknik manajemen laba adalah meningkatkan laba yang dilaporkan pada periode kini untuk membuat perusahaan dipandang lebih baik. Cara ini juga memungkinkan peningkatan laba selama beberapa periode.

2. *Big bath*

Teknik *big bath* dilakukan melalui penghapusan (*write-of*) sebanyak mungkin pada satu periode. Periode yang dipilih biasanya periode dengan kinerja yang buruk (seringkali pada masa resesi dimana perusahaan lain juga melaporkan laba yang buruk) atau peristiwa saat terjadi satu kejadian yang tidak biasa seperti perubahan manajemen, merger, atau restrukturisasi. Teknik *big bath* juga seringkali dilakukan setelah strategi peningkatan laba pada periode sebelumnya.

3. Perataan laba

Perataan laba merupakan bentuk umum manajemen laba. Manajer meningkatkan atau menurunkan laba yang dilaporkan untuk mengurangi fluktuasinya. Perataan laba juga mencakup tidak melaporkan bagian laba pada periode baik dengan menciptakan cadangan laba dan kemudian melaporkan laba ini pada saat periode buruk. Banyak perusahaan menggunakan bentuk manajemen laba seperti ini.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.3.3 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Manajemen Laba

Menurut Scoot (2006) dalam Rindang (2017) terdapat berbagai motivasi perusahaan melakukan manajemen laba, yaitu:

1. *Other Contractual Motivation*

Secara umum untuk memenuhi kewajiban-kewajiban kontraktual termasuk perjanjian hutang (*debts convernants*).

2. *To Communicate Information To Investor*

investor akan melihat kebijakan akuntansi yang dipilih ketika mengevaluasi dan membandingkan laba.

3. *Political Motivations*

Untuk mengurangi biaya politis dan pengawasan dari pemerintah, untuk memperoleh kemudahan dan fasilitas pemerintah seperti subsidi dan perlindungan dari pesaing luar negeri, untuk meminimalkan tuntutan serikat buruh yang dilakukan dengan cara menurunkan laba.

4. *Taxation Motivations*

Manajemen laba dilakukan untuk tujuan penghematan pajak, yaitu dengan cara memperkecil perolehan laba sehingga mengakibatkan apa yang dibayarkan kepada pemerintah juga lebih kecil dari yang seharusnya

5. *Changes Of Executive Offier (CEO)*

CEO yang mendekati akhir jabatannya cenderung melakukan *income maximation* untuk meningkatkan bonus mereka.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. *Initial Public Offerings* (IPO)

Perusahaan yang akan melakukan penawaran saham perdana (IPO) cenderung melakukan *Income Increasing* untuk menarik investor.

2.4 Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)

Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian manajemen pajak dan merupakan langkah awal dalam melakukan manajemen pajak. Menurut Aditama (2012) Perencanaan pajak (*tax planning*) merupakan bagian dari manajemen pajak dan merupakan langkah awal di dalam melakukan manajemen pajak. Suandy (2008) mendefinisikan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai proses mengorganisasi usaha wajib pajak atau sekelompok wajib pajak sedemikian rupa sehingga utang pajak, baik PPh maupun beban pajak yang lainnya berada pada posisi yang seminimal mungkin. Seminimal mungkin dalam hal ini dilakukan sepanjang hal ini masih berada di dalam peraturan perpajakan yang berlaku, sehingga kegiatan perencanaan pajak (*tax planning*) ini dilegalkan oleh pemerintah. Pada tahap awal perencanaan pajak ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan-peraturan perpajakan agar dapat diseleksi jenis penghematan pajak yang dapat dilakukan.

Menurut Yin dan Cheng (2004) dalam Ningsih (2016) menyatakan bahwa perusahaan yang memiliki perencanaan pajak yang baik akan mendapatkan keuntungan dari *Tax Shields* dan dapat meminimalisasi pembayaran pajak.

Lumbantoruan (1996 : 489) dalam Aditama (2012) menjelaskan bahwa ada beberapa cara yang dapat dilakukan oleh wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak, di antaranya yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Pergeseran pajak (*tax shifting*) adalah pemindahan atau mentransfer beban pajak dari subjek pajak kepada pihak lainnya. Dengan demikian, orang atau badan yang dikenakan pajak dimungkinkan sekali tidak menanggung beban pajaknya.
- b. Kapitalisasi adalah pengurangan harga objek pajak sama dengan jumlah pajak yang akan dibayarkan kemudian oleh pihak pembeli.
- c. Transformasi adalah cara pengelakan pajak yang dilakukan oleh perusahaan dengan cara menanggung beban pajak yang dikenakan terhadapnya.
- d. Penggelapan pajak (*tax evasion*) adalah penghindaran pajak yang dilakukan secara sengaja oleh wajib pajak dengan melanggar ketentuan perpajakan yang berlaku. Penggelapan pajak (*tax evasion*) dilakukan dengan cara memanipulasi secara ilegal beban pajak dengan tidak melaporkan sebagian dari penghasilan, sehingga dapat memperkecil jumlah pajak terutang yang sebenarnya.
- e. Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah usaha wajib pajak untuk meminimalkan beban pajak dengan cara menggunakan alternatif-alternatif yang riil yang dapat diterima oleh fiskus. Suandy (2008) menyebutkan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) adalah rekayasa "*tax affairs*" yang masih tetap dalam bingkai peraturan perpajakan yang ada.

2.4.1 Strategi Perencanaan Pajak

Strategi perencanaan pajak menurut Chairil Anwar (2013:10) antara lain :

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Tax Saving*

Tax saving adalah upaya untuk mengefisienkan beban pajak melalui pemilihan alternatif pengenaan pajak dengan tarif yang lebih rendah.

2. *Tax Avoidance*

Tax avoidance adalah upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan objek pajak .

3. Penundaan pergeseran pembayaran pajak

Penundaan/penggeseran kewajiban pajak dapat dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku.

4. Mengoptimalkan kredit pajak yang diperkenankan

Wajib pajak seringkali kurang mendapat informasi mengenai pembayaran yang dapat dikreditkan. Sebagai contoh : PPh pasal 22 atas pembelian solar dari Pertamina yang bersifat final jika pembeliannya perusahaan yang bergerak di bidang penyaluran migas.

5. Menghindari Pemeriksaan Pajak dengan Cara Menghindari Lebih Bayar.

Menghindari pemeriksaan pajak dapat dilakukan dengan mengajukan pengurangan pembayaran angsuran PPh pasal 25 ke KPP yang bersangkutan, apabila berdasarkan estimasi dalam tahunan pajak yang bersangkutan akan terjadi kelebihan pembayaran pajak. Selain itu dapat juga mengajukan permohonan pembebasan PPh pasal 22 impor apabila perusahaan melakukan impor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau..

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Menurut PSAK 46 mendefinisikan bahwa beban pajak (*tax expense*) atau penghasilan pajak (*tax income*) adalah Jumlah agregat pajak kini (*current tax*) dan pajak tangguhan (*deferred tax*) yang diperhitungkan dalam perhitungan laba atau rugi pada satu periode. Akuntansi Pajak Tangguhan di Indonesia, akuntansi Pajak Penghasilan diatur dalam Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No 46 paragraf 07 dimana aktiva pajak tangguhan didefinisikan sebagai jumlah pajak penghasilan terpulihkan pada periode mendatang sebagai akibat:

1. Perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, yaitu perbedaan temporer yang menimbulkan suatu jumlah yang boleh dikurangkan dalam penghitungan laba fiskal periode mendatang pada saat nilai tercatat aktiva dipulihkan atau nilai tercatat kewajiban tersebut dilunasi.
2. Sisa kompensasi kerugian yaitu saldo rugi fiskal yang dapat dikompensasi pada periode yang akan datang. Dari aspek pengukuran, besarnya nilai tercatat aktiva pajak tangguhan harus ditinjau kembali pada tanggal neraca. Paragraf ini mempunyai implikasi bahwa pernyataan ini dapat dimanfaatkan oleh manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan melakukan pengukuran subjektif dan beban atas suatu aktiva pajak tangguhan dan prediksi laba fiskal yang akan datang.

Dari paragraf tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa pembentukan cadangan dengan penurunan atau kenaikan aktiva atau kewajiban pajak tangguhan bisa dipengaruhi *judgment* untuk menentukan pembentukan cadangan dan besarnya penghasilan kena pajak yang diperkirakan pada periode fiskal mendatang yang bervariasi secara signifikan tergantung pada lingkungan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

individual perusahaan. *Judgment* untuk mempertimbangkan kondisi- kondisi yang bersifat subyektif di atas memungkinkan manajemen untuk melakukan manajemen laba dengan instrumen akun aktiva pajak tangguhan.

2.6 Kepemilikan Manajerial

Salah satu mekanisme yang digunakan untuk menurunkan konflik yang disebabkan oleh pemisahan kepemilikan dan kontrol diantara kedua belah pihak adalah dengan menawarkan manajemen untuk berpartisipasi dalam program opsi saham yang dikenal sebagai kompensasi berbasis saham. Pemberian kompensasi ini untuk manajer akan mengakibatkan peningkatan kepemilikan manajerial (Premanickul dan Kritaya, 2012).

Abdul Halim (2007) menjelaskan kepemilikan di dalam perusahaan dibuktikan dengan lembar saham biasa. Setiap lembar saham menyatakan pemiliknya memiliki $1/n$ dari saham perusahaan, dimana “n” menunjukan jumlah lembar saham yang dikeluarkan. Untuk tujuan manajemen keuangan, kekayaan pemegang saham dinyatakan dengan harga pasar per lembar saham dari perusahaan yang bersangkutan. Wulandari (2011:26) kepemilikan saham manajerial adalah kepemilikan saham oleh manajemen akan mengurangi *agency problem* diantara manajer dan pemegang saham, yang dapat dicapai melalui penyalarsan kepentingan diantara pihak-pihak yang berbenturan kepentingan. Disisi yang lain, manajer yang memiliki saham perusahaan dalam porsi yang besar memiliki lebih banyak insentif untuk mengutamakan kepentingan sendiri dari pada kepentingan semua pemegang saham.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Jensen dan Meckling (1976) dalam Kawatu (2009:408) menjelaskan kepemilikan manajerial merupakan saham perusahaan yang dimiliki oleh manajemen perusahaan. Kepemilikan manajemen terhadap saham perusahaan dipandang dapat menyelaraskan potensi perbedaan antara pemegang saham luar dengan manajemen, sehingga permasalahan keagenan diasumsikan akan hilang apabila seorang manajer adalah seorang pemilik juga. Proporsi kepemilikan saham yang dikontrol oleh manajer dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan. Kepemilikan manajerial akan mensejajarkan kepentingan manajemen dengan pemegang saham, sehingga akan memperoleh manfaat langsung dari keputusan yang diambil serta menanggung kerugian sebagai konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah.

2.7 Ukuran Perusahaan

Menurut Brigham & Houston (2010:4) menyatakan ukuran perusahaan merupakan ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai oleh total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut Torang (2012:93) mendefinisikan ukuran perusahaan, ukuran organisasi adalah menentukan besarnya jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai tujuan. Riyanto (2008:313) menyatakan ukuran perusahaan menggambarkan besar kecilnya perusahaan dilihat dari besarnya besarnya nilai *equity*, nilai penjualan atau nilai aktiva.

Berdasarkan definisi diatas, menunjukkan ukuran perusahaan merupakan suatu skala besar kecilnya perusahaan yang dilihat dari besarnya nilai *equity*, nilai

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penjualan atau aktiva dan berperan sebagai suatu variabel konteks yang mengukur tuntutan pelayanan atau produk yang dihasilkan oleh organisasi.

2.7.1 Klasifikasi Ukuran Perusahaan

UU No. 20 Tahun 2008 mengklasifikasikan ukuran perusahaan kedalam 4 (empat) kategori yaitu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Pengklasifikasian ukuran perusahaan tersebut didasarkan pada total asset yang dimiliki dan total penjualan tahunan perusahaan tersebut. UU No. 20 Tahun 2008 Pasal 1 (Satu) tersebut mendefinisikan usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar sebagai berikut:

Tabel 2.1
Kriteria Ukuran Perusahaan yang diatur dalam UU No.20 Tahun 2008
adalah sebagai berikut

Ukuran perusahaan	Kriteria	
	Asset (tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha)	Penjualan tahunan
Usaha Mikro	Maksimal 50 juta	Maksimal 300 juta
Usaha Kecil	>50 juta - 10 M	>30 juta - 2,5M
Usaha Menengah	>10 Juta - 10 M	2,5 M - 50 M
Usaha Besar	>10 M	>50 M

Besar atau kecilnya ukuran perusahaan akan mendorong melakukan praktek manajemen laba. Perusahaan kecil akan menaikkan jumlah labanya untuk menarik investor dalam menanamkan modal sehingga perusahaan akan terus berkembang, sedangkan perusahaan yang berukuran besar melakukan praktek manajemen laba untuk menghindari laba yang fluktuasi secara drastis, laba yang merata akan membuat perusahaan tidak mengalami penurunan harga saham,

kepercayaan dari pihak investor ataupun dari pemeriksaan langsung yang dilakukan oleh petugas pajak.

2.8 Manajemen Laba dalam Perspektif Islam

Dalam Al-Qur'an telah dijelaskan masalah kepatuhan dan ketaatan dalam berniaga dan pencatatan akuntansi khususnya penyajian laporan keuangan yang sesuai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Surah Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رَجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكَّرَ إِحْدُهُمَا الْأُخْرَىٰ وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسَاءَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلٍ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا وَإِنْ تَفَعَّلُوا فَإِنَّهُ فَسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikitpun dari padanya. Jika yang berutang itu orang yang akalnya atau lemah (keadaannya), atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi laki-laki di antara kamu. Jika tidak ada (saksi) dua orang laki-laki, maka (boleh) seorang laki-laki dan dua orang perempuan di antara orang-orang yang kamu sukai dari para saksi (yang ada), agar jika seorang lupa maka yang seorang lagi mengingatkannya. Dan janganlah saksi-saksi itu menolak apabila dipanggil. Dan janganlah kamu bosan menuliskannya, untuk batas waktunya baik (utang itu) kecil maupun besar. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah, lebih dapat menguatkan kesaksian, dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan, kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan ambillah saksi apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit dan begitu juga saksi. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sungguh, hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”

2. QS : An-Nisa ayat 29 yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dengan jalan perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah Maha Penyayang kepadamu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat tersebut diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan yang batil untuk memakan harta sesamanya apabila dipungut tidak sesuai dengan aturan

2.9 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelitian – penelitian yang telah dilakukan, berikut ringkasan penelitian terdahulu

Tabel 2.2
Daftar Penelitian Terdahulu

Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
Dewa Ketut Wira Santana dan Made Gede Wirakusuma (2016)	Pengaruh perencanaan pajak, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba (studi perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek Indonesia periode 2008-2010)	perencanaan pajak, kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba	perencanaan pajak berpengaruh positif terhadap praktek manajemen laba, sedangkan kepemilikan manajerial dan ukuran perusahaan menunjukkan hasil tidak berpengaruh
Ghafara Mawaridi Mazini Tundjung (2015)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba (studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di bursa efek indonesia 2011-2013)	Beban pajak tangguhan, discretionary accrual, manajemen laba.	Bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif signifikan terhadap manajemen laba, discretionary accrual tidak berpengaruh terhadap Manajemen Laba.
Evi Juliani Pujiati dan Muhammad Arfan (2013)	Struktur Kepemilikan dan Kompensasi Bonus serta pengaruhnya terhadap Manajemen Laba pada perusahaan manufaktur yang	Kepemilikan Manajerial, Kepemilikan Institusional, dan Kompensasi Bonus,	Bahwa Kepemilikan Manajerial berpengaruh negatif terhadap Manajemen Laba Sedangkan, Kepemilikan Institusional dan Kompensasi Bonus

	terdaftar di BEI tahun 2006-2010	Manajemen Laba	berpengaruh signifikan terhadap Manajemen Laba
Muhammad Fadhlizen, Mmeihen dritan Yeasy Darmayanti (2013)	Pengaruh Perencanaan Pajak dan Aktiva Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun (2009-2013)	Manajemen Laba Perencanaan Pajak Aktiva Pajak Tangguhan	Penelitian ini menunjukkan bahwa perencanaan pajak dan aktiva pajak tangguhan tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba
Ferry Aditama Anna Purwaningsih (2013)	Pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba	perencanaan pajak terhadap manajemen laba	Perencanaan pajak ternyata tidak berpengaruh positif terhadap manajemen Laba pada perusahaan nonmanufaktur yang terdaftar di BEI.
Yana Ulfa (2013)	Pengaruh Beban Pajak Tangguhan dan Perencanaan Pajak terhadap Praktik Manajemen Laba	Beban pajak tangguhan, perencanaan pajak, manajemen laba	Beban pajak tangguhan berpengaruh positif artinya setiap kenaikan beban pajak tangguhan, maka probabilitas perusahaan melakukan manajemen laba akan mengalami peningkatan

2.10 Pengembangan Hipotesis

2.10.1 Hubungan Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba

Perusahaan melakukan perencanaan pajak seefektif mungkin, karena pihak manajemen menginginkan beban pajak seminimal mungkin dan melakukan pembayaran pajak seminimal mungkin maka perusahaan melakukan perencanaan pajak. Bukan hanya untuk memperoleh keuntungan dari segi fiskal saja, tetapi sebenarnya perusahaan juga memperoleh keuntungan dalam memperoleh tambahan modal dari pihak investor melalui penjualan saham perusahaan. Oleh karena itu, pajak yang merupakan unsur pengurang laba yang tersedia untuk dibagi kepada investor atau diinvestasikan oleh perusahaan, akan diusahakan oleh

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

manajemen untuk diminimalkan guna mengoptimalkan jumlah dari laba bersih perusahaan.

Menurut Fadhlizen, Meihendri dan Darmayanti (2013) yang meneliti tentang pengaruh perencanaan pajak terhadap manajemen laba pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan menunjukkan hasil bahwa perencanaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap manajemen laba. Penelitian Dewa Ketut Wira Santana dan Made Gede Wirakusuma (2016) menunjukkan bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba. Sedangkan menurut Rindang Siduarsih (2017) menunjukkan hasil bahwa perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba.

H₁ : Diduga perencanaan pajak berpengaruh terhadap manajemen laba

2.10.2 Pengaruh Beban Pajak Tangguhan Terhadap Manajemen Laba

Perbedaan antara laporan keuangan akuntansi dan perpajakan disebabkan karena dalam penyusutan laporan keuangan, standar akuntansi lebih memberikan keleluasaan bagi manajemen dalam menentukan prinsip dan estimasi akuntansi dibandingkan yang diperbolehkan menurut peraturan perpajakan. Perbedaan antara laba akuntansi dengan laba fiskal memiliki hubungan positif dengan insentif laporan keuangan seperti *financial distress*, dan pemberian bonus dengan adanya hal tersebut maka dimungkinkan manajer dapat melakukan rekayasa laba dengan memperbesar atau memperkecil jumlah beban pajak tangguhan yang diakui dengan laporan laba rugi. Menurut Ghafara Mawaridi Mazini Tundjung (2015) bahwa beban pajak tangguhan berpengaruh positif terhadap manajemen laba.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H₂ : Diduga Beban Pajak Tangguhan berpengaruh terhadap Manajemen Laba

2.10.3 Pengaruh Kepemilikan Manajerial Terhadap Manajemen Laba

Kepemilikan manajerial dianggap sebagai salah satu faktor yang berpengaruh terhadap manajemen laba yang dilakukan manajer. Jika manajer mempunyai kepemilikan pada perusahaan, maka manajer akan bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham karena manajer juga mempunyai kepentingan di dalamnya. Besar kecilnya jumlah kepemilikan saham manajerial dalam perusahaan dapat mengindikasikan adanya kesamaan (*congruence*) kepentingan antara manajemen dengan pemegang saham, namun jika kepentingan manajer dan pemilik dapat disejajarkan, manajer tidak akan termotivasi untuk memanipulasi informasi atau melakukan manajemen laba sehingga kualitas informasi akuntansi dan keinformatifan laba dapat meningkat (Faisal, 2004). Dengan memperbesar kepemilikan manajerial diharapkan dapat mengurangi tindakan manajemen laba yang tercermin dari berkurangnya nilai *discretionary accruals*. Besarnya kepemilikan manajerial diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan dan laba yang dihasilkan.

H₃ : Diduga Kepemilikan manajerial berpengaruh terhadap manajemen laba.

2.10.4 Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba

Ukuran perusahaan dapat menunjukkan bagaimana keadaan perusahaan tersebut apakah tergolong perusahaan yang mempunyai kinerja yang bagus dengan pengalaman dan perkembangannya atau bahkan sebaliknya. Sehingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dapat mengetahui kemampuan perusahaan dan tingkat risiko dalam mengelola investasi yang diberikan pada pemegang saham. Semakin besar ukuran perusahaan, biasanya informasi yang tersedia untuk investor dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan investasi dalam perusahaan tersebut semakin banyak.

Herni dan Susanto (2008) serta Handayani dan Rachadi (2009) mengungkapkan bahwa ukuran perusahaan dilihat dari jumlah total aktiva perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan tentu memiliki total aktiva yang relatif besar, sehingga dapat beroperasi dengan tingkat efisiensi yang lebih tinggi serta semakin besar peluang perusahaan untuk memperoleh laba dari operasinya. Penelitian ini membuktikan bahwa faktor ukuran perusahaan memiliki pengaruh terhadap manajemen laba.

H₄ : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap manajemen laba

2.10.5 Pengaruh perencanaan pajak, beban pajak tangguhan, kepemilikan manajerial, dan ukuran perusahaan terhadap manajemen laba

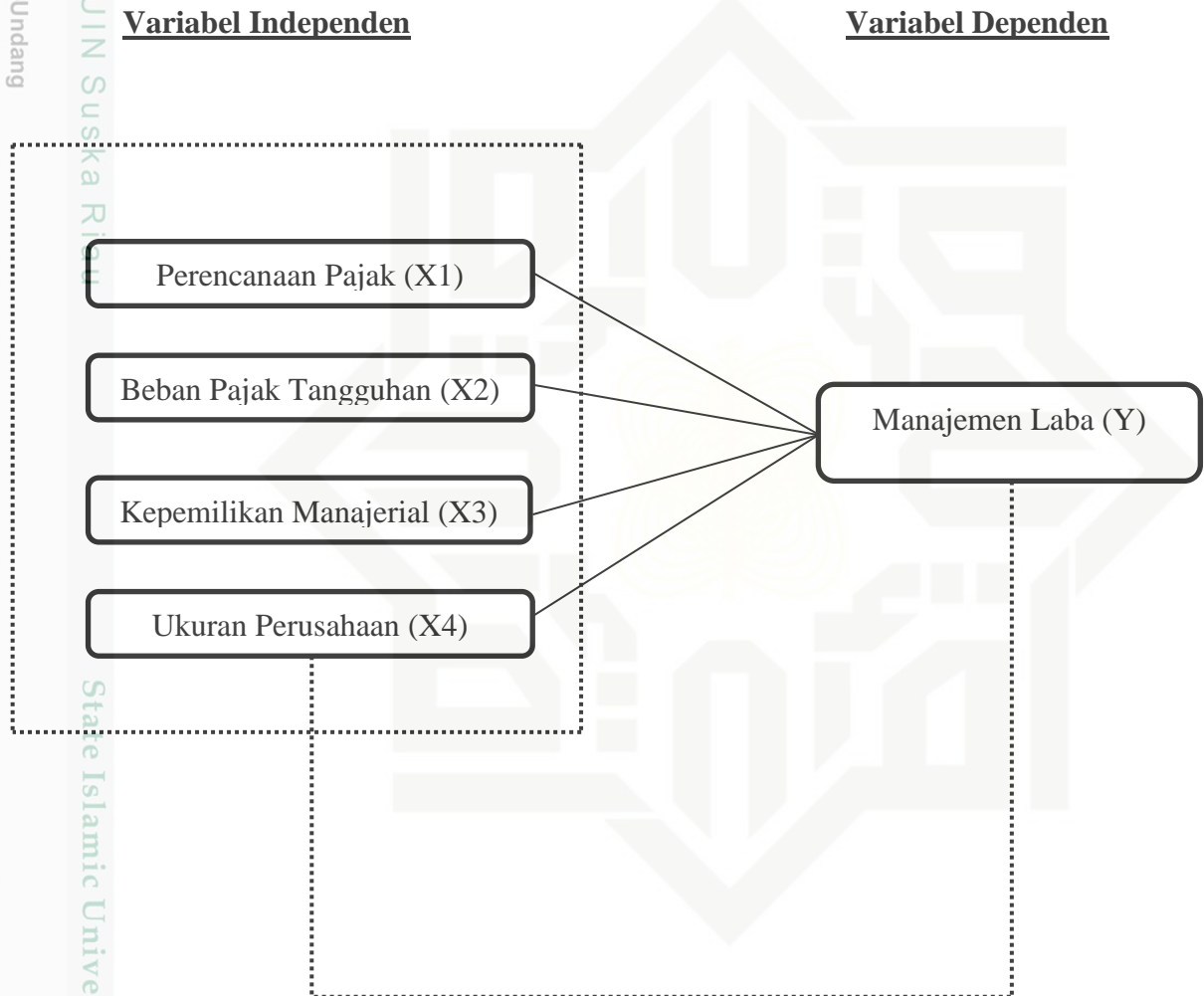
Berdasarkan beberapa hasil penelitian yang mendukung hipotesis-hipotesis parsial dan teori-teori yang memperkuat maka hipotesis ke lima dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

2.11 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan uraian diatas, gambaran menyeluruh tentang pengaruh perencanaan pajak, Beban Pajak Tangguhan ,Kepemilikan Manajerial, Ukuran Perusahaan Terhadap Manajemen Laba yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia

Tahun 2013-2016 yang merupakan kerangka konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut

Tabel 2.3
Kerangka Pemikiran



Keterangan Gambar :

————— : Parsial

.....; Simultan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau